

Strategi Pembiayaan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Oleh : Syafaruddin Alwi

Pendahuluan

Dalam dasawarsa limapuluhan, pandangan tentang ekonomi pembangunan mengikuti pemikiran Harrod dan Domar yang menggambarkan pembangunan merupakan fungsi pembentukan modal dan laju pertumbuhan. Ini berarti, proses pembangunan akan berlangsung melalui akumulasi modal dan kecepatan laju pertumbuhan. Masalahnya adalah, umumnya negara yang tergabung dalam kelompok negara-negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi kendala dua gap atau dua celah yaitu gap tabungan dan gap devisa. Negara yang mengalami keadaan yang demikian ini menghadapi masalah kekurangan tabungan dan devisa untuk mengimpor barang-barang modal bagi pembangunan. Akibatnya Model Harrod-Domar menjadi tidak berfungsi dalam kondisi yang demikian sehingga strategi selanjutnya diarahkan pada bagian mengisi celah itu. Salah satu sumber pemasukan modal luar negeri yang makin penting dalam beberapa tahun ini adalah investasi asing langsung (FDI), sebagai akibat relokasi industri di beberapa negara di wilayah Pasifik khususnya Jepang, negara-negara industri baru dan kepentingan kita sendiri akan modal selain utang luar negeri. Dilihat dari sudut

pandangan model Dua Celah, mengandalkan utang luar negeri yang besar untuk menutup celah itu mengandung pengertian bahwa tingkat tabungan dalam negeri masih rendah. Keadaan ini akan menimbulkan masalah yang serius dalam jangka panjang terutama pada masa perdagangan bebas. Beranjak dari kondisi ini pembicaraan mengenai strategi pembiayaan pembangunan menjadi relevan.

Kemiskinan menurut pendiri mazhab Ekonomi Baru Keynes, merupakan cacat perekonomian karena ketidakmampuannya memberikan kesempatan kerja yang penuh dan kewenangannya dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang tidak merata. Perspektif pertumbuhan percaya pada proses trickle down sehingga jika pertumbuhan tercapai, pemerataan akan terjadi. Tentu saja melalui proses penciptaan lapangan kerja baru sebagai akibat perluasan investasi. Pada kenyataannya kondisi ini tidak terjadi secara sempurna sehingga pembicaraan mengenai pengentasan kemiskinan dalam konteks pembiayaan pembangunan ini juga relevan untuk dibicarakan. Masalah yang akan dibahas adalah, strategi pembiayaan pembangunan yang bagaimana yang menguntungkan posisi Indonesia dalam konteks global sekarang ini dan relevansinya dengan

Drs. H. Syafaruddin Alwi M.Si, adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

pengentasan kemiskinan. Perlu diketahui, bahwa selama pelita VI, jumlah pertambahan angkatan kerja diperkirakan mencapai 11,0 juta jiwa. Ini berarti meningkat dari 81,3 juta jiwa menjadi 92,3 juta jiwa. Pertambahan sebesar itu akan menimbulkan beban ekonomi, sebagai akibat masih terbatasnya lapangan kerja.

Kondisi obyektif Indonesia

Indonesia sampai saat ini (pasca IGGI) tetap dihadapkan pada persoalan, bagaimana membiayai pembangunan dengan tidak mengandalkan produk migas melainkan bertumpu pada pendapatan yang berasal dari ekspor produk non-migas. Bagi negara kita konsekuensi dari pelaksanaan strategi promosi ekspor sebagai pengganti dari strategi substitusi impor, dan menerima pinjaman hutang luar negeri disatu pihak memperoleh keuntungan dari adanya pertumbuhan sebagai akibat pinjaman itu, tetapi dilain pihak mengalami ketergantungan yang besar terhadap beban angsuran hutang. Hutang yang semakin besar yang saat ini mencapai US \$ 100 milyar, akan memperburuk perekonomian dalam negeri dengan merosotnya nilai tukar dollar dipasar internasional, akibat yendaka dan kelemahan ekonomi dalam negeri AS. Ada tiga saran dari Bank Dunia berkaitan dengan perbaikan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, pengurangan hutang luar negeri. Kedua, memperbesar arus masuk modal

asing. Ketiga, mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan harga public utilities. Saran pertama dan kedua sangat berkait dengan topik ini yaitu menyangkut pembiayaan pembangunan Indonesia yang selama ini dianggap terlalu mengandalkan pada hutang luar negeri. Hubungannya dengan pengentasan kemiskinan adalah, bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan pinjaman luarnegeri. Paradigma Neo Klasik menjelaskan kemiskinan dapat diatasi ketika pertumbuhan tinggi dapat tercapai melalui proses yang dinamakan trickle down effect.

Untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi (sekitar 6%), diperlukan investasi tertentu. Pada posisi tahun 1986, paling tidak menurut Sadli (1987), diperlukan 30% dari PDB bagi keperluan investasi yang terdiri dari tabungan dalam negeri dan sisanya sekitar 5% diharapkan berasal dari capital inflow dari luar negeri. Ketika itu pertumbuhan sebesar itu memang tercapai berkat peran produk migas yang masih besar. Proyeksi yang disusun berdasarkan periode tahun 1988-1998 (tabel 1) menurut Hasibuan (1987), menunjukkan pemasukan modal luar negeri pada tahun 1993 dan tahun 1998 diharapkan tercapai sebesar 16% dan 15% dari seluruh pembiayaan pembangunan. Proyeksi tentang besarnya investasi sesuai dengan pendapatan Sadli yaitu lebih kurang 30% dari PDB.

Tabel 1.
Proyeksi Sumber Pembiayaan Pembangunan 1988 - 1998 (%)

Sumber	1988	1993	1998
Tabungan pemerintah	25	18	12
Tabungan sektor pertanian	20	17	15
Tabungan sektor non pertanian	38	49	57
Pemasukan modal luar negeri	17	18	15
Investasi : PDB	30,6	30,7	30,8

Proyeksi tersebut mendekati kenyataan. Berdasarkan data pada tahun 1971 gross domestic saving kita tercatat sekitar 35,7% dan dengan mengacu pada pengertian ini, tingkat tabungan yang dicapai sekitar 31% dari nilai PDB. Angka ini cukup tinggi. Akan tetapi penggunaan tabungan ini untuk investasi kurang efisien karena nilai ICOR Indonesia sebesar 4,23% termasuk masih tinggi dibandingkan dengan angka ICOR normal negara-negara berkembang lainnya yaitu 3,5% (Arsyad Anwar, 1993).

Dari mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan bagi negara-negara berkembang, sebenarnya merupakan masalah klasik. Bagi Indonesia sejak awal Orde Baru, persoalan ini telah menjadi sumber isu yang tak pernah habis. Apa lagi jika sumber pembiayaan itu berasal dari bantuan luar negeri (baca hutang), tidak lagi merupakan masalah ekonomi tetapi sudah menjadi bagian dari masalah politik. Ekonomi-politik pembiayaan pembangunan jelas menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan untuk

memacu tingkat pertumbuhan ekonomi sampai pada taraf tertentu dan kepentingan rakyat akan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui strategi pembangunan yang dalam perspektif ekonomi politik harus dapat mengentaskan kemiskinan. Walaupun kelihatan mudah untuk memilih dan menentukan apakah peningkatan pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui strategi pembiayaan sendiri atau strategi pembiayaan gabungan antara sumber dalam negeri dan hutang luar negeri, namun pada kenyataannya hal itu telah menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Disatu pihak kita menyadari bahwa bantuan luar negeri dan kekurangan tabungan dalam negeri dan kekurangan devisa (gap tabungan dan gap devisa), tetapi disisi lain kita tahu bahwa itu akan menciptakan ketergantungan pembiayaan pada luar negeri. Sedangkan dipihak lain disadari pula tidak satu pun negara-negara berkembang didunia ini yang bisa bebas murni dari hutang luar negeri. Rumania pernah mengalami hal ini tetapi menyebabkan kesengsaraan pada rakyatnya karena semua sumber daya ekonomi dalam

negeri digunakan untuk membayar hutang luar negeri sehingga walaupun tidak memiliki hutang, rakyatnya menjadi melarat. Lalu persoalannya sekarang apa? Meniadakan hutang atau mengendalikan penggunaannya yang kemudian berangsur-angsur menguranginya? Alternatif kedua ini saya kira lebih baik. Konsekuensinya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri harus dikembangkan.

Saat ini hanya ada dua perspektif yang dapat digunakan untuk menolong kita menganalisa strategi apa yang digunakan untuk menjaring sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Pertama, perspektif ketergantungan berpandangan bahwa kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang, baku: justru disebabkan oleh ketergantungan struktural antara negara berkembang dengan negara-negara maju. Berdasarkan pandangan ini pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri bukanlah alternatif yang dianjurkan. Pandangan ini sejalan dengan Mahbub Ul Haq (1983), yang juga menganggap bahwa ketergantungan Dunia Ketiga terhadap bantuan luar negeri merupakan salah satu faktor pembawa "bencana" bagi negara berkembang. Sebab selama dua puluh tahun terakhir, bantuan luar negeri yang diterima oleh negara-negara berkembang, kurang membawa hasil sehingga menurutnya lebih baik membangun tanpa bantuan luar negeri. Kegagalan misi pinjaman luar negeri ini antara lain disebabkan pinjaman tersebut disertai dengan syarat harus dibelanjakan dalam bentuk barang-barang modal di negara asal. Kerugian dengan cara ini bagi negara-negara peminjam, modal tersebut tidak bisa dipakai sebagai modal kerja.

Modifikasi yang dapat dilakukan adalah mengurangi pinjaman luar negeri tetapi meningkatkan investasi asing secara langsung (direct investment). Cara ini pun kurang menjamin kepentingan kita sebagai Host Country. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor yang terlihat pada perilaku investor asing di dalam negeri. Penelitian Hal Hill (1990), barangkali dapat mendukung pendapat ini. Studi Hal Hill menunjukkan sampai dengan tahun 1985, dari realisasi investasi asing sebesar 6,07 milyar dollar, hanya sebesar 31% yang dibiayai melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan asing di dalam negeri. Ini berarti cash inflows yang masuk ke Indonesia sangat kecil sehingga investor asinglah yang menarik keuntungan karena investasinya dibiayai oleh sumber-sumber dalam negeri. Keadaan ini menjadi semakin parah dengan adanya repatriasi keuntungan investor asing di dalam negeri keluar negeri. Data yang berasal dari Dana Moneter Internasional selama kurun waktu 1972-1990 menunjukkan arus modal asing untuk tujuan investasi langsung secara kumulatif mencapai 6,06 milyar dollar. Sedangkan pendapatan yang direpatriasi keluar negeri mencapai 59,2 milyar dollar. Fakta ini menunjukkan investasi asing kurang menguntungkan. Agar sesuai dengan keinginan (capital inflows), maka masuknya investor asing secara langsung harus disertai persyaratan jumlah barang-barang modal yang memang dibiayai oleh sumber-sumber luar negeri (core country).

Kedua, perspektif Neo Klasik, yang berpendapat bahwa bantuan luar negeri justru merupakan salah satu cara untuk memutus lingkaran kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang. Perdebatan

tentang hal ini tidak pernah selesai. Jalan keluar dari konflik pemikiran ini adalah modifikasi dari sisi tengah kedua perspektif tersebut yaitu, setiap negara berkembang termasuk Indonesia sebaiknya lebih banyak menjalankan strategi pembiayaan melalui peningkatan investasi asing dari pada melalui peningkatan hutang luar negeri. Cara ini seperti yang telah diuraikan dimuka ternyata kurang menguntungkan jika tidak diikuti dengan kebijaksanaan pendukung lainnya seperti ketentuan-ketentuan repatriasi dan penanaman kembali retained earning kedalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang mempunyai forward linkage dan atau backward linkage. Bahkan hutang luar negeri dikatakan jauh lebih baik dibandingkan dengan strategi investasi asing secara langsung karena tekanan arus dana keluar lebih rendah dari pada investasi asing. Data IMF

menunjukkan sampai dengan tahun 1990 pembayaran bunga hutang luar negeri pada tahun itu sebesar US \$ 2540 (juta), lebih kecil dari pada jumlah keuntungan yang direpatriasi keluar negeri yaitu sebesar US \$ 5316 (juta). Sedangkan arus masuk investasi asing hanya sebesar US \$ 964 (juta) (tabel 2).

Hemat saya, investasi asing secara langsung asal ditanamkan pada sektor yang terkait dengan perekonomian rakyat dan dikendalikan melalui berbagai peraturan repatriasi, dan diarahkan kepada ekspor akan lebih baik. Tetapi hal itu tidak mudah karena investor asing tertarik menanamkan modalnya di Indonesia justru karena pasar domestik kita yang besar. Sedangkan syarat yang dituntut oleh Deklarasi Bogor, investor asing harus diberlakukan sama dengan investor domestik.

Tabel 2.
Bunga Hutang, Repatriasi Keuntungan dan Arus Modal Asing 1986 - 1990
(juta US \$)

Tahun	Pembayaran Bunga	Keuntungan yang Direpatriasi	Arus Masuk Investasi Asing
1986	- 2072	- 3948	+ 258
1987	- 2273	- 4215	+ 385
1988	- 2526	- 4584	+ 576
1989	- 2501	- 5109	+ 682
1990	- 2540	- 5316	+ 964

Sumber : Sritua Arief, Dikutip dari IMF dan Laporan Bank Dunia Dimodifikasi Penulis.

Data tersebut menunjukkan ketidakseimbangan arus masuk dan keluar dana sebagai akibat investasi asing dan pinjaman luar negeri. Ini berarti perluasan kesempatan kerja akibat masuknya foreign direct investment (FDI) dalam perekonomian kita kurang mendukung perluasan kesempatan kerja sebagai akibat repatriasi keuntungan yang sangat besar. Hal ini berarti relevansi dengan penanggulangan kemiskinan rendah.

Masalah Kemiskinan.

Pola Pembangunan Ekonomi di Indonesia bila diamati sedikit-tidaknya pada periode 1966-1973, dapat dikatakan menganut strategi pertumbuhan tinggi guna mengejar ketinggalan. Strategi ini tetap menjadi acuan sampai pada tahun 1980-an, walaupun pada tahun 1974 terjadi pergeseran kebijaksanaan yaitu dengan melalui penyebaran pembangunan ke daerah-daerah dalam bentuk program-program seperti pemberian kredit untuk pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat, proyek-proyek inpres, pengembangan koperasi dsb. Oleh karena ekonomi nasional pada awal Orde Baru dalam keadaan kekurangan modal dan tingkat teknologi yang rendah, serta kekurangan tenaga terdidik, maka sikap politik yang ditunjukkan pemerintah pada permulaan pembangunan membuka diri dengan mencari bantuan pinjaman luar negeri dan melakukan kebijaksanaan substitusi impor (SI).

Kebijaksanaan SI ini merupakan siasat untuk mengurangi ketergantungan sebagai akibat celah tabungan untuk investasi dan impor alat-alat modal. Tetapi sayangnya, Strategi SI ini walaupun telah

berhasil mendorong berkembangnya sektor modern, tetapi kurang mendorong perkembangan sektor subsistennya. Pemilik modal kebanyakan bergerak disektor modern yang padat modal. Akibatnya sektor modern belum mampu mengimbangi permintaan tenaga kerja sehingga pengangguran meningkat. Perkembangan perekonomian disektor modern telah menimbulkan kelompok-kelompok pengusaha baru yang mempunyai kemampuan tinggi untuk memobilisasi dana sehingga muncullah konglomerasi. Dampak negatif ini berlawanan dengan cita-cita demokrasi ekonomi yang tertuang dalam GBHN.

Keadaan ini jika berlanjut terus, pada pembangunan jangka panjang kedua (PJP II), akan kurang menguntungkan karena tidak mendorong proses perubahan lebih cepat dan meskipun terjadi perubahan akan menimbulkan ketimpangan sosial yang lebih parah. Akibat dari keadaan ini beban pemerintah akan semakin berat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang diikuti pemerataan hasil-hasilnya memerlukan strategi yang spesifik yang sesuai dengan karakteristik potensi ekonomi, sosial budaya dan sistem politik suatu negara. Sesuai dengan tahapan pembangunan ekonomi dan perspektif kebutuhan masyarakat, maka strategi pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan kenyataan bahwa bagian terbesar dari penduduk angkatan kerja kita, bekerja disektor tradisional. Oleh sebab itu strategi pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk membina basis ekonomi golongan menengah dan bawah.

Untuk menunjang tercapainya tujuan pertumbuhan dan pemerataan strategi yang

dikemukakan oleh Gupta (1977) perlu dipertimbangkan. Gupta berdasarkan; pengalaman Indonesia mengajukan dua alternatif strategi pembangunan ekonomi jangka panjang. *Pertama*, apabila suatu kebijaksanaan pemerataan tidak dapat dilaksanakan maka tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan terbaik karena melalui pertumbuhan tinggi akhirnya akan mempercepat proses transisi ke keadaan yang lebih merata. *Kedua*, bila pemerataan merupakan keadaan yang mendesak dilihat dari segi ekonomi, sosial, politik, maka pertumbuhan harus dikorbankan. Alternatif kedua yang dikemukakan Gupta lebih menarik untuk didiskusikan karena alternatif pertama sudah pernah dilaksanakan dan tidak sepenuhnya berhasil. Sekarang sudah waktunya kita memihak pada kepentingan orang banyak. Alasannya sederhana. Walaupun pada tahun 1990 diketahui jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan hanya 27 juta jiwa, kesenjangan pendapatan belum tentu semakin kecil. Pola pembangunan yang mengandalkan mekanisme pasar seperti yang kita canangkan sekarang ini, hanya akan mendorong tumbuh lebih cepat bagi golongan yang mempunyai skill dan modal yang kuat.

Strategi Pembiayaan

Dari uraian dimuka, tidak mudah bagi kita untuk memilih strategi yang memuaskan kepentingan semua pihak. Paling mungkin yang kita lakukan adalah strategi pembiayaan yang mengandalkan kekuatan dalam negeri, dengan dukungan pembiayaan luar negeri khususnya melalui PMA dan mengurangi pinjaman. Terlepas

dari adanya efek negatif dari masuknya PMA, harus secara jujur kita akui bahwa kita membutuhkan investasi asing sebagai salah satu sumber pembiayaan. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya investasi asing di Indonesia masih lebih rendah. Malaysia misalnya, capital inflownya berdasarkan data Pacific Economic Development Report 1995, mencapai US\$ 4.118 million. Singapore US\$ 5.635 Million (1992). Sedangkan Kita pada tahun yang sama hanya US\$ 1.774 million. Oleh sebab itu saran yang diajukan oleh Bank Dunia cukup relevan untuk dipertimbangkan. Yang penting sekarang adalah, mengambil kebijaksanaan yang orientasinya cenderung kepada investasi yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, sehingga kelemahan yang ditemui dari peraktek-peraktek investasi asing harus bisa diatasi. Kepada investor asing tidak hanya diberi berbagai fasilitas yang menarik tetapi juga syarat-syarat yang menguntungkan rakyat kecil. Misalnya investasi diarahkan pada produk manufaktur yang berorientasi ekspor khususnya pada sektor industri berat. Celaknya memang ada. Justeru pasar domestik yang dituju oleh kebanyakan investor karena akan lebih menguntungkan mereka dan mereka cenderung melakukan konsentrasi. Malaysia juga mengalami keadaan seperti ini.

Keadaan ini harus dikendalikan khususnya untuk industri ringan (makanan, minuman, tembakau, kertas dsb). Pengendalian ditujukan pada kelompok industri ringan yang prospek untuk ekspor tinggi. Kertas sebagai contoh, masuknya investor asing pada subsektor industri ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar kertas dan pulp

sampai dengan tahun 2005. Demikian pula dengan industri mainan. ekspor produk ini telah mengalami peningkatan dari hanya US\$ 2,3 juta pada tahun 1983 menjadi US\$ 62 juta pada tahun 1991. Departemen Perdagangan memperkirakan akan mencapai US 1 milyar pada tahun 2000. Sub sektor ini banyak melibatkan tenaga kerja sehingga kalau investasi asing terarah pada kelompok industri seperti ini maka akan meningkatkan pendapatan pekerja.

Penggalangan kemampuan pembiayaan dalam negeri merupakan strategi terbaik dalam jangka panjang, tetapi harus didukung oleh kebijaksanaan pengembangan di sektor riil dan bukan hanya mengandalkan kebijaksanaan moneter dan fiskal. Menaikkan tingkat bunga untuk memperbesar tabungan dalam negeri pada situasi sekarang ini lebih banyak akan menghambat laju investasi itu sendiri. Pengembangan di sektor riil diharapkan dapat memacu perdagangan di pasar internasional sehingga menghasilkan devisa. Pengurangan hutang luar negeri memang harus dikurangi untuk memacu peningkatan tabungan dalam negeri. Penggalan dana melalui penjualan saham BUMN seperti yang telah dilakukan sebagai salah satu cara meringankan beban sektor perdagangan luar negeri sangat mungkin dilakukan tetapi harus disadari dalam jangka panjang BUMN yang bersangkutan akan mengalami over kapitalisasi (nilai saham yang beredar lebih tinggi dari nilai riil aset) jika tidak mampu bekerja secara efisien dan menghasilkan return of invesment yang layak.

Pembiayaan pembangunan yang berasal dari sumber dalam kebijaksanaan pemerintah nampaknya tetap mengarah

kepada pajak sebagai sumber penerimaan utama yang sekaligus juga menunjukkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu pertimbangannya ialah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar rata-rata 6% pertahun dan untuk menekan inflasi. Kebijakan ini penting karena jika inflasi meningkat melebihi dua digit berdampak menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap dan rendah. Strategi ini hendaknya diarahkan kepada penekanan pajak progresif sebagai upaya untuk memperkecil kesenjangan pendapatan didalam masyarakat. Untuk memacu kehidupan perekonomian rakyat pengeluaran pemerintah sebaiknya dikurangi dan peningkatan investasi pada infrastuktur ditingkatkan terutama diluar pulau Jawa. Diharapkan melalui cara ini potensi ekonomi rakyat akan dapat dikembangkan sehingga perekonomian menjadi lebih terbuka dan lebih dinamis.

Dalam kaitan dengan investasi asing, Departemen Perindustrian telah mengidentifikasi 19 jenis produk yang memiliki daya saing kuat untuk memasuki pasar global antara lain, tekstil, kayu, kulit, produk makanan, mainan, plastik dsb. Diharapkan pertumbuhan ekspor manufaktur selama pelita VI, mencapai rata-rata lebih dari 17,5% pertahun (Hartarto, 1994). Oleh sebab itu investasi asing hendaknya diarahkan pada industri yang menghasilkan produk-produk tersebut. sementara itu kredit dalam negeri sebaiknya disalurkan pada pengusaha kecil dan menengah yang mampu mensuplai kebutuhan industri-industri jenis tersebut. Persoalan penting yang terkait dengan pembiayaan dalam negeri adalah, bagaimana dana-dana perbankan dapat

teralokasi dengan baik. Peristiwa tahun 1992 hendaknya tidak terjadi lagi yaitu, sebagian besar kredit perbankan tersalur kepada kelompok-kelompok besar dan terarah pada usaha-usaha spekulasi tinggi.

Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini saya ingin menyatakan beberapa dasar kebijaksanaan yang perlu memperoleh perhatian yaitu :

1. Strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mengarah kepada kepentingan pemerataan . Ini berarti harus terbentuk suatu kemitraan usaha antara pengusaha besar dan pengusaha kecil. Investor asing dan investor dalam negeri. Kebijakan untuk lebih mengembangkan pembiayaan pembangunan melalui FDI, lebih baik dari pada mengandalkan hutang. Yang perlu menjadi perhatian dalam hal ini adalah, mengendalikan efek samping yang negatif dari keberadaan FDI tersebut.
2. Strategi pendanaan, harus diutamakan pengembangan kemampuan dalam negeri, diikuti oleh alokasi dana secara merata dan bukan untuk tujuan-tujuan spekulatif. Investasi asing lebih baik dikembangkan dari pada menambah hutang luar negeri dengan menggunakan azas kepentingan bersama (take and give) dan harus dicegah agar tidak mengarah kepada konsentrasi industri yang negatif. Investasi asing tetap merupakan pelengkap sumber pembiayaan. Seyogyanya pedoman
3. Mobilisasi dana dalam negeri hendaknya memperhatikan pula penggalangan-pendapatan asli daerah disamping penyebaran dana melalui APBN, agar kehidupan ekonomi daerah menjadi lebih handal. Harus dicegah perluasan peran perbankan di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari kelompok-kelompok perbankan konglomerat untuk menjaring dana dari daerah ke pusat. Proses ini sangat merugikan penyebaran pembangunan ekonomi diseluruh wilayah.

dalam kebijakan penjaminan diusahakan agar negara-negara donor tetap memberikan pinjaman dengan syarat-syarat lunak, untuk mendukung pengembalian pinjaman, agar pertumbuhan ekspor dipertahankan pada tingkat yang mampu membayar cicilan hutang dan bunga yaitu pertumbuhan pada tingkat 10%. Salah satu sasaran strategis dalam kebijakan produksi dan ekspor adalah peningkatan sebesar 200% di tahun 1995 dibandingkan dengan tingkat ekspor pada tahun 1986 (ISEI, 1989). Kebijakan penanggulangan pembayaran hutang luar negeri dengan mengandalkan kemampuan BUMN melalui penjualan saham pada pasar modal internasional haruslah merupakan kebijakan jangka pendek karena untuk jangka panjang itu akan merugikan BUMN disebabkan beban (leverage), yang menjadi lebih besar. Pada hakekatnya saham yang terjual itu jika digunakan untuk membayar hutang negara, adalah hutang secara tidak langsung. BUMN yang bersangkutan akan mengalami over kapitalisasi.

Daftar Pustaka

- Anwar Arsyad, *Prospek Ekonomi Indonesia*, Penerbit PT Gramedia, 1993
- Arief Sritua, *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*, LRP Jakarta, 1993
- Gupta Syamaprasadya, *A Model For Income Distribution Employment and Growth : Case Study of Indonesia*, John Hopkin Press, 1977
- Hill Hal, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, LP3ES, Jakarta 1990
- hasibuan Sayuti, *lapangan kerja dan Sasaran Sasaran pembangunan jangka panjang lainnya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987
- Haq Mahbub UI, Dalam Tulisan Dieter Senghass, *Tata Ekonomi Dunia baru dan Politik Pembangunan*, PL3ES, 1988
- ISEI, kumpulan Makalah mengenai *Pembangunan, Pembiayaan dan Kesempatan Kerja*, 1989
- Sadli Muhammad, *Pembentukan Kebijakan Ekonomi di Masa Orde Baru Dilemma dan Solusi*, PT. Gramedia Jakarta, 1987.